

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Saat ini, Indonesia bahkan dunia sedang mengalami penurunan ekonomi, dimana salah satu faktornya karena muncul wabah virus corona. Kasus virus Corona diketahui lewat penyakit misterius yang melumpuhkan Kota Wuhan, China. Tragedi pada akhir 2019 tersebut terus berlanjut hingga penyebaran virus Corona mewabah ke seluruh dunia (detik.com, 2020). Pandemi ini menular sangat cepat, sampai tidak ada negara yang absen dari virus ini. Indonesia pun ikut menjadi sasarannya. Sejumlah industri pun mengalami kerugian akibat pandemi ini. Meski begitu, tidak berlaku bagi sektor industri manufaktur yang tetap konsisten dan berperan penting dalam perekonomian Indonesia. Sesuai dengan data (<https://kemenperin.go.id/>, 2021), sektor manufaktur telah memberikan kontribusi terbesar terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) nasional pada triwulan II-2021, yakni sebesar 17,34%. Lima besar kontributor PDB di periode ini adalah industri makanan dan minuman sebesar 6,66%, industri kimia, farmasi dan obat tradisional sebesar 1,96%, industri barang logam, komputer, barang elektronik, optik dan peralatan listrik sebesar 1,57%, industri alat angkutan 1,46%, serta industri tekstil dan pakaian jadi sebesar 1,05%. Ini yang menjadikan sektor manufaktur dapat dikatakan sebagai penolong dari terjadinya resesi ekonomi.

Persaingan di dunia bisnis juga semakin ketat, dapat dilihat dari semakin banyaknya kompetitor baru yang bermunculan. Mereka dituntut untuk memiliki keunggulan tersendiri agar dapat bersaing. Salah satu kelemahan yang dimiliki sebagian besar perusahaan di Indonesia adalah *good corporate governance*. Banyak upaya yang telah dilakukan untuk mengatasi hal tersebut, salah satunya pembentukan Komite Nasional Kebijakan *Governance* (KNKG). Lembaga tersebut dibentuk untuk menyiapkan pedoman GCG Indonesia pada sektor bisnis yang disesuaikan dengan perkembangan di level global. OJK juga membuat Peta Arah

Tata Kelola Perusahaan Indonesia pada 2014 yang ditunjukkan untuk emiten dan perusahaan publik (liputan6.com, 2021).

Penerapan *good corporate governance* dalam perusahaan dapat digunakan untuk memprediksi masalah internal perusahaan seperti pengelolaan manajemen yang buruk, terjadinya korupsi, dan kurangnya tanggung jawab sosial. Semakin baik penerapan *corporate governance* pada perusahaan maka perusahaan dalam kondisi *monitoring* yang baik, sehingga meningkatkan kinerja dan dapat mengurangi kecenderungan kondisi *financial distress* pada sebuah perusahaan.

Menurut (Khresna Brahmana, 2007), suatu perusahaan dikategorikan sedang mengalami kesulitan keuangan ketika menunjukkan angka negatif pada laba operasi, laba bersih, dan nilai buku ekuitas serta perusahaan itu melakukan *merger*. Kondisi *financial distress* ini terjadi saat perusahaan tidak mampu memenuhi pembayaran hutang kepada kreditur saat jatuh tempo. Terdapat beberapa mekanisme yang dapat diterapkan dalam *corporate governance* untuk meminimalisir terjadinya kondisi *financial distress* dan dipilih peneliti sebagai variabel yang meliputi ukuran dewan komisaris, ukuran komisaris independen, ukuran dewan direksi, ukuran direksi independen, ukuran komite audit, dan kompetensi komite audit.

Sistem yang diterapkan di Indonesia adalah sistem *two board*, dimana terdapat pemisahan fungsi pengawasan dan fungsi manajemen ke dalam dua badan yang berbeda. Dewan direksi yang memiliki kewajiban dalam penyusunan pedoman sedangkan dewan komisaris memberikan nasihat dan mengawasi direksi (Effendi, 2018). Peran mereka tentu sangat penting dalam keberhasilan penerapan GCG. Dalam penelitian (Etna & Yuyetta, 2019) yang menggunakan laba bersih sebagai proksi *financial distress* menunjukkan hasil bahwa jumlah dewan direksi berpengaruh negatif terhadap *financial distress*. Artinya, semakin banyak jumlah dewan direksi di suatu perusahaan maka dapat mengurangi probabilitas terjadinya *financial distress*. Dan hasil dari jumlah dewan komisaris memiliki pengaruh positif terhadap probabilitas *financial distress*. Dimana jumlah dewan komisaris yang besar justru mempertinggi kemungkinan perusahaan berada pada kondisi *financial distress*. Terdapat istilah direksi independen atau komisaris independen,

keberadaan mereka sebagai wakil pemegang saham independen (minoritas) termasuk mewakili kepentingan lainnya (Effendi, 2016).

Dewan komisaris dibantu oleh beberapa komite, salah satunya komite audit. Komite audit dibentuk dengan tujuan untuk mempertahankan kepercayaan masyarakat terhadap mekanisme akuntansi, *auditing*, serta sistem pengendalian lainnya, sehingga unsur-unsur pengendalian tersebut tetap optimal dalam sistem ekonomi pasar (Effendi, 2018). Penelitian (Kusumaningtias, 2020), memberikan hasil bahwa komite audit memiliki pengaruh terhadap *financial distress*. Semakin sedikit jumlah komite audit maka dapat membuat perusahaan terhindar dari kondisi kesulitan keuangan.

Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan, maka dari itu peneliti mengambil judul **“Pengaruh Good Corporate Governance Terhadap Financial Distress (Studi Empiris pada Perusahaan Manufaktur yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Tahun 2019-2021)”**.

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian dari latar belakang di atas, maka dapat dirumuskan masalah sebagai berikut:

1. Apakah ukuran dewan komisaris berpengaruh terhadap *financial distress* pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI tahun 2019-2021?
2. Apakah ukuran komisaris independen berpengaruh terhadap *financial distress* pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI tahun 2019-2021?
3. Apakah ukuran dewan direksi berpengaruh terhadap *financial distress* pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI tahun 2019-2021?
4. Apakah ukuran direksi independen berpengaruh terhadap *financial distress* pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI tahun 2019-2021?
5. Apakah ukuran komite audit berpengaruh terhadap *financial distress* pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI tahun 2019-2021?
6. Apakah kompetensi komite audit berpengaruh terhadap *financial distress* pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI tahun 2019-2021?

1.3. Tujuan Penelitian

Rumusan masalah yang telah diuraikan di atas, untuk membuktikan secara empiris:

1. Pengaruh ukuran dewan komisaris terhadap *financial distress* pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI tahun 2019-2021.
2. Pengaruh ukuran komisaris independen terhadap *financial distress* pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI tahun 2019-2021.
3. Pengaruh ukuran dewan direksi terhadap *financial distress* pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI tahun 2019-2021.
4. Pengaruh ukuran direksi independen terhadap *financial distress* pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI tahun 2019-2021.
5. Pengaruh ukuran komite audit terhadap *financial distress* pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI tahun 2019-2021.
6. Pengaruh kompetensi komite audit terhadap *financial distress* pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI tahun 2019-2021.

1.4. Manfaat Penelitian

Penelitian ini memiliki dua manfaat yaitu manfaat teoritis dan manfaat praktis. Berikut penjelasan kedua manfaat tersebut.

1. Manfaat Teoritis
 - a. Menambah pemahaman mengenai pengaruh *corporate governance* terhadap *financial distress*.
 - b. Sebagai literatur atau pertimbangan bagi masyarakat yang ingin berinvestasi.
2. Manfaat Praktis
 - a. Bagi peneliti
Penelitian ini dapat menjadi pembelajaran dan menambah wawasan penulis mengenai pengaruh *corporate governance* terhadap *financial distress*.
 - b. Bagi investor

Penelitian ini dapat menjadi informasi bagi investor mengenai *financial distress* dan prospek perusahaan di masa yang akan datang dan dapat menjadi pertimbangan investor dalam melakukan investasi.